



► RELOKASI PKL MALIOBORO

Toleransi Hanya Dua Hari

Sunartono, Sirojul Khafid, & Yosef Leon
redaksi@harianjogja.com

JOGJA—Pemda DIY menyatakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro ke dua lokasi sudah bulat dan tidak bisa ditawar lagi. Waktu mundur yang diminta PKL hanya bisa diberikan antara satu hingga dua hari saja dari jadwal yang sudah ditentukan.

Sekda DIY Kadarmantha Baskara Aji memastikan relokasi PKL Malioboro sudah bulat meski ada pihak yang tidak setuju. Pemindahan ribuan PKL ini tinggal menunggu hari saja. “Jalan terus, [kalau permintaan mundur] sampai Februari enggak ada masalah, [tetapi pelaksanaan dimulai] akhir Januari,” ujarnya di Kepatihan, Senin (17/1).

Toleransi Hanya...

Aji juga merespons adanya PKL Malioboro yang menyampaikan aspirasi ke Pemkot dan DPRD Kota Jogja. Menurutnya hal itu wajar, tentu aspirasi itu akan ditampung. Namun soal aspirasi permintaan relokasi mundur, Aji tak yakin dapat dipenuhi. "Itu kan menyampaikan aspirasi boleh saja, nanti aspirasi yang kira-kira bisa kita lakukan, ya kita sesuaikan, dilakukan. [Permintaan relokasi mundur] Mundur satu atau dua hari enggak masalah," ucapnya.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga itu mengatakan dari sisi tempat, semua fasilitas sudah siap. Bahkan persiapan telah hampir mendekati 100%. Hanya tinggal mengelola pemindahan dan menentukan siapa dan berlokasi di lapak mana. "Sudah tinggal melaksanakan, fasilitas sudah 100 persen, tinggal siap di mana," katanya.

Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Jogja, Kris Sarjono Sutejo, mengatakan penataan PKL Malioboro dengan menempatkan di area eks Bioskop Indra dan eks Kantor Dispar DIY merupakan upaya penguatan status aktivitas ekonomi pelaku PKL. "Sebelumnya dengan menempati selasar Malioboro yang merupakan bagian dari kepemilikan pemilik toko, bisa dikatakan keberadaan mereka adalah informal. Dengan adanya mereka menempati tempat yang disediakan tersebut, mereka kemudian menjalankan aktivitas ekonominya dalam status formal," kata Kris, Senin.

Penataan PKL ini merupakan desain penataan ekonomi serta dalam rangka penguatan daya dukung Malioboro ke depannya yang diinisiasi Pemerintah Daerah

DIY dan Pemerintah Kota Jogja. "Kebijakan ini bukan langkah relokasi, tetapi murni penataan karena aktivitas jualan PKL tetap dipertahankan berada di area Malioboro. Ini merupakan kebijakan penataan sekaligus memberikan status yang lebih kuat bagi para pelaku," kata Kris.

Sementara itu berdasarkan pantauan Harian Jogja di lahan eks Dispar DIY, tiang dan atap di bangunan utama telah selesai. Namun belum ada properti atau sejenisnya di bagian lapak. Fasilitas toilet dan taman di bagian belakang sudah selesai. Saat ini pengerjaan berada di area taman depan dan penggalian dua sumur.

Untuk area eks Bioskop Indra, sejauh ini belum bisa dicek. Petugas keamanan yang berjaga mengatakan masih ada penataan beberapa material. Beberapa kendaraan terlihat lalu-lalang di pintu eks Bioskop Indra membawa berbagai barang.

Aksi Unjuk Rasa

Sementara itu, ratusan PKL Malioboro yang terdampak relokasi menyambangi gedung DPRD Kota Jogja pada Senin. Ketua Persatuan Pedagang Kaki Lima Yogyakarta (PPKLY), Wawan Suhendra, mengatakan Pemda DIY dan Pemkot Jogja sejak awal tidak transparan dan terbuka menyampaikan rencana relokasi kepada para PKL. Rencana relokasi juga terkesan tergesa-gesa dan mengejar target.

Menurut Wawan, PKL tidak menolak rencana relokasi itu. Hanya saja, mereka meminta agar kebijakan yang berkaitan dengan PKL disampaikan dengan komprehensif dan membuka keran dialog. Sehingga semua

hal yang berkaitan dengan relokasi bisa mengakomodasi kepentingan semua pihak.

"Kami tidak menolak, tapi kami minta relokasi ditunda karena masih masa pandemi. Semua sektor masih masa pemulihan, lah ini malah memindahkan PKL," ujarnya.

Berkaitan dengan rencana relokasi, PKL juga mendesak agar DPRD Kota Jogja segera membentuk panitia khusus (Pansus). Pansus nantinya diharapkan bisa memfasilitasi aspirasi PKL, pemerintah dan berbagai pihak lainnya. Sebab, rencana relokasi disinyalir bakal segera dieksekusi dalam waktu dekat ini.

Ketua DPRD Kota Jogja, Danang Rudyatmoko, menjelaskan sejak awal urgensi relokasi PKL Malioboro belum diketahui secara detail. "DPRD Kota Jogja mengaku juga tidak dilibatkan dalam rencana relokasi itu. Oleh karenanya, sejak awal isu relokasi mencuat Danang mengklaim pihaknya telah melakukan pembahasan soal pembentukan Pansus. "Semoga hari ini [kemarin] bisa segera dibentuk dan mulai bekerja. Nanti anggota Pansus kami usahakan agar diisi oleh semua fraksi yang bisa menjembatani aspirasi PKL ke Pemkot Jogja maupun Pemda DIY," ungkapnya.

Danang mengaku, pernyataan terhadap PKL di Malioboro mestinya memang dilakukan. Sebab, kondisinya sudah tak lagi kondusif dan terlalu membludak. Hanya saja, kebijakan relokasi itu mestinya dilakukan dengan komprehensif misalnya terkait dengan sosialisasi yang menyeluruh, pendataan para PKL, penyiapan tempat yang representatif dan sebagainya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005